

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Artidjo Alkosar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004
- Aziz Syamsuddi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum; Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2019
- Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019
- Friedman, L. M., *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Idup Suhady, *Kepemerintahan yang Baik*, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta, 2009
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006

- Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI), Jakarta, 2005
- R Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta (Anggota IKAPI), Bandung, 1982
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Taher Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009
- Maria Parida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1996
- Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, Warta Bagja, Bandung, 2015
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Modren English Press, Jakarta, 1991
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghaiia Indonesia, Jakarta, 1982

- Samidjo, *Ilmu Negara*, CV. Armico, Bandung, 2002
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2000
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Tim Penyusun Kamus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988
- Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

## **Jurnal**

Anwar C, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume III, Tahun 2010

Darnell F. Hawkins, *a Review Sociological justice by Donald Black*, Social Forces Journal, Volume 69, 1990

Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara Das Sein dan Das Sollen)*, Perspektif Jurnal Ilmu Hukum, Volume XVII, 2012

Fauzi, *Hak Atas Informasi dan Legal standing Para Pihak dalam Sengketa Informasi di Komisi Informasi*, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Volume VIII, 2015

M. Syamsyudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Jurnal Yudisial, Volume 7, 2017

Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16, 2020

Ridwan, *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik, Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Pro Justicia, Volume 26, 2008

Toni, *Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XI, 2017

## **Sumber Lainnya**

Ardhias Adhi Wibowo, “Implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan negeri Surakarta”, Tesis, Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, <<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8609/ARDHIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>, diunduh pada sabtu 31 Oktober 2020

Jimly Asshiddiqie, Pengadilan Khusus, <[http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN\\_KHUSUS\\_02.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf)>, diunduh pada 16 Juli 2021

Lusia Arumingtyas, Tak Buka Data HGU, Koalisi akan Pidanakan Kementerian ATR, <<https://www.mongabay.co.id/2019/03/25/tak-buka-data-hgu-koalisi-akan-pidanakan-kementerian-atr/>>, diakses Sabtu tanggal 31 Oktober 2020

Moh. Dani Pratama Huzaini, Polemik Keterbukaan Informasi HGU, Begini Penjelasan Menteri ATR/BPN, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce27beb8f8de/polemik-keterbukaan-informasi-hgu--begini-penjelasan-menteri-atr-bpn/>>, diakses pada Sabtu 31 Oktober 2021